

Pengaruh *Government Size*, *Fiscal Distress*, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Manipulasi Akrua

Lisda Tampubolon¹, Evada Dewata^{2*}, Desi Indriasari³, Hadi Jauhari⁴

^{1,2,3}Program Studi D IV Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Sriwijaya

⁴Program Studi D IV Usaha Perjalanan Wisata, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Corresponding author email: evada78@polsri.ac.id

Abstract

This study aims to test what factors affect accrual manipulation, which in this study consists of 3 variables, including; Government size, Fiscal Distress, and Excess of Budget Calculation (SiLPA) using the Modified Jones model approach. The data used is secondary data in the form of Regional Government Financial Statements of 17 districts/cities in South Sumatra Province for the five-year period 2017-2021. The data analysis used was multiple regression using the EVIEWS program tool version 12 as a multiple regression tool. The results of the research findings obtained are that Government Size does not have a significant effect on accrual manipulation because it is not directly related to financial management, while Fiscal distress and SiLPA have a significant effect on accrual manipulation. The implications of these findings can be used as a basis for the development of better accounting policies and practices that focus on ongoing fiscal policy oversight and improved integrity in local government financial reporting.

Keywords: *Fiscal Distress, Government Size, SiLPA, Manipulation Accrual*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi manipulasi akrual, yang mana pada penelitian ini terdiri dari 3 variabel antara lain; *Government Size*, *Fiscal Distress*, dan Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan menggunakan pendekatan model *Modified Jones*. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode lima tahun 2017-2021. Analisis data yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil dari temuan penelitian yang diperoleh adalah *government size* tidak berpengaruh signifikan terhadap manipulasi akrual karena tidak terkait langsung dalam pengelolaan keuangan, sedangkan *fiscal distress* dan SiLPA berpengaruh signifikan terhadap manipulasi akrual. Adapun implikasi dari temuan ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan dan praktik akuntansi yang lebih baik berfokus pada pengawasan kebijakan fiskal yang sedang berlangsung dan peningkatan integritas dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *Fiscal distress, government size, manipulasi akrul.*

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyediaan layanan publik dan pengelolaan sumber daya publik yang memberikan fasilitas informasi finansial. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut pemerintah daerah memerlukan pengelolaan laporan keuangan sebagai wujud yang baik, transparan dan akuntabilitas (Kromen et al., 2023). Namun

adanya penerapan konsep *New Public Management* (NPM), berfokus pada tingkat kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, dengan mengadopsi prinsip manajemen yang efektif dan efisien menggunakan penerapan basis akrual serta hadirnya kebijakan diskresi akrual menyebabkan terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan salah satunya adalah manipulasi akrual (Handayani et al., 2022).

Manipulasi akrual adalah praktik yang dapat mengubah pelaporan keuangan pemerintah daerah yang memiliki kebebasan dalam melaporkan aset dan kewajiban serta mengakui pendapatan dan pengeluaran menggunakan diskresi akrual (Cohen et al., 2019). Praktik tersebut sulit dideteksi sehingga disalahgunakan untuk memanipulasi kebijakan akuntansi akrual (Pilcher, 2011). Manipulasi akrual bisa terjadi di sektor privat maupun sektor publik. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda seperti halnya di sektor privat melakukan manipulasi akrual untuk meningkatkan laba, nilai perusahaan dan menghindari kesulitan keuangan. Sementara di sektor publik salah satunya untuk meningkatkan kinerja keuangan (R. Gamayuni et al., 2022) Hal tersebut terjadi, akibat adanya penerapan atas kebijakan diskresi akrual memberikan peluang bagi manajemen keuangan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan dengan estimasi atau penilaian tidak objektif yang berdampak terhadap penyesuaian kinerja keuangan seperti penilaian aset atau penilaian kewajiban (Arcas & Martí, 2016).

Secara teoritis manipulasi akrual dapat dikaitkan dengan *agency theory* yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana prinsipal (pemerintah pusat) dan agen (pemerintah daerah) (Arcas & Martí, 2016). Hubungan dari *agency theory* terhadap manipulasi akrual adalah terdapatnya konflik kepentingan, dan asimetris informasi antara prinsipal dan agen dalam pengelolaan keuangan publik untuk memanipulasi akrual, sehingga menciptakan persepsi yang baik atas kinerja laporan keuangan yang mencapai titik impas diatas nol menghindari kerugian dengan menyamarkan kinerja keuangan yang buruk (Pina et al., 2012).

Terdapat fenomena manipulasi akrual yang telah diinvestigasi secara luas di berbagai negara, seperti halnya Swedia, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Portugal, Italia, dan Finlandia. Penelitian tersebut mengungkapkan bukti bahwa pemerintah daerah telah melakukan manipulasi akrual sebagai upaya untuk menghindari defisit anggaran. (Cohen et al., 2019; Handayani et al., 2022). Pemerintah menyamarkan defisit melalui perubahan pencatatan akuntansi dengan memindahkan pengeluaran atau dana yang berbeda dan mengubah waktu transaksi (Cohen et al., 2019). Ada atau tidak nya manipulasi akrual dapat diukur dengan *mean absolut*. Apabila *mean absolut* sama dengan nol diartikan tidak terjadi praktik manipulasi akrual. Sebaliknya jika mean absolut tidak sama dengan nol berarti ada praktik manipulasi akrual (R. Gamayuni et al., 2022).

Government size atau ukuran pemerintah merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar atau kecil organisasi pemerintah daerah (Sari & Mustanda, 2019). Ukuran pemerintah dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat manipulasi akrual dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan ukuran pemerintah mencerminkan kompleksitas implementasi layanan publik seperti halnya kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Untuk memenuhi tuntutan ini pemerintah daerah memerlukan anggaran yang lebih besar yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan tindakan manipulasi akrual, sehingga faktor ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi kinerja keuangan (Ramahdani & Trisnaningsih, 2022).

Fiscal distress adalah fenomena kompleks yang menyangkut unit-unit sektor keuangan publik di tingkat pusat dan daerah yang dipengaruhi oleh faktor risiko ekonomi, keuangan, sosial, dan demografi (Galiński, 2023). Temuan yang dilakukan Winarna et al. (2017) menyoroti bahwa semakin luas cakupan pemerintah daerah, semakin berat biaya infrastruktur dan biaya pemeliharaan yang menjadi beban bagi unit, dimana pemerintah daerah lebih rentan menghadapi kesulitan keuangan. Fenomena ini menjadi kompleks karena interaksi antara faktor-faktor ini dapat menghasilkan situasi keuangan yang sulit diidentifikasi dan diprediksi. Maka dari itu pemerintah daerah mengupayakan tidak terjadi *fiscal distress* yang mendorong terjadinya manipulasi akrual untuk menghindari defisit.

Pemerintah daerah yang mengalami defisit melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut salah satunya adalah menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya (Shafira, 2022). Menurut Septariani (2023) SiLPA merupakan selisih penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode anggaran, dimana terdapat indikator yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengendalikan pengeluarannya, tidak mengalami defisit, dan memiliki kemampuan untuk membiayai kebutuhan publik. Jika SiLPA lebih besar penerimaan yang berasal pendapatan sisa belanja yang tidak terealisasi disebut kinerja keuangan yang buruk. Hal tersebut menyebabkan terjadinya manipulasi akrual untuk menciptakan persepsi bahwa kinerja keuangan baik, namun tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Rohman et al., 2021).

Studi ini dilakukan untuk mengeksplorasi keterbaruan penelitian tentang manipulasi akrual. Berbeda dengan penelitian Handayani et al., (2022) menggunakan Model Jones Modifikasi tetapi tidak spesifik, karena tidak menggunakan akun piutang dalam perhitungan persamaan Model Jones Modifikasi. Dimana nilai piutang dapat mempengaruhi adanya manipulasi akrual, karena jika ingin meningkatkan pendapatan pemerintah dapat meningkatkan piutang dengan memodifikasi nilai piutangnya begitu juga dengan sebaliknya. Pengukuran tersebut digunakan untuk memperoleh hasil secara empiris apakah manipulasi akrual dipengaruhi oleh variabel *government size*, *fiscal distress*, dan SiLPA.

Adapun kontribusi yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan informasi dan manfaat bagi pemerintah dalam pengembangan kebijakan akuntansi berbasis akrual dan peningkatan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga meminimalisir terjadinya manipulasi akrual

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory menggambarkan hubungan antara (*principal*) yaitu pemerintah pusat dan (*agency*) yaitu pemerintah daerah yang memperkenalkan konsep asimetris informasi sebagai penyebab utama terjadinya konflik kepentingan antara pihak (*principal*) dan pihak (*agen*) (Bisogno & Donatella, 2021). Asimetri informasi antara pemerintah pusat dan daerah merujuk pada ketidaksetaraan informasi atau pengetahuan antara kedua tingkat pemerintahan tersebut dalam suatu negara, karena dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi, kewenangan berbeda, kompleksitas regulasi, kemampuan dan sumber daya serta ketergantungan keuangan. Adanya asimetri informasi ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan untuk melakukan praktik manipulasi akrual dalam mengelola Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk mencapai titik optimal yaitu nol (Octariyani et al., 2022).

Menurut Beck, (2018) tindakan manipulasi akrual dilakukan pemerintah daerah (*agent*) untuk tujuan dan motif tertentu seperti insentif, pencitraan, dan penghargaan. Insentif yang dimaksud merupakan dana insentif daerah dimana pemerintah daerah akan mendapatkan dana insentif apabila mencapai kinerja keuangan yang baik, sedangkan pencitraan yang diperoleh untuk membangun citra positif dari publik dan pemangku kepentingan. Sementara motif berupa penghargaan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat atau badan pemeriksa keuangan atas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan hal tersebut manipulasi akrual berdampak negatif terhadap laporan keuangan karena disajikan tidak akurat, mempengaruhi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan, dan menurunkannya kepercayaan dari masyarakat.

Manipulasi Akrual

Manipulasi akrual merupakan tindakan penyesuaian atau perubahan dalam laporan keuangan dengan tujuan memengaruhi evaluasi kinerja keuangan, kualitas pelaporan keuangan, dan pengelolaan surplus atau defisit (Donatella, 2021). Penyesuaian atau perubahan dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan seperti mengubah estimasi, catatan transaksi kebijakan akuntansi sehingga menampilkan kondisi laporan keuangan yang tidak sesuai (R. R. Gamayuni, 2022). Pemerintah berharap kebijakan diskresi akrual yang normal yang memiliki hubungan berpola dengan aspek-aspek lain-lain seperti total akrual, pemasukan piutang, *plant property*, dan *Equipment* (PPE), yang sejalan dengan upaya untuk memahami dampak dan implikasi dari kebijakan diskresi akrual terhadap aspek dalam pengelolaan keuangan (Rohman, 2018).

Menurut Pellicer et al., (2016) penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintah menciptakan diskresi akrual yang memotivasi melakukan praktik manajemen surplus/defisit karena adanya insentif/motif bagi manajemen sektor publik untuk mencapai target berada di titik impas. Artinya pemerintah berusaha mencapai atau berusaha untuk menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran guna menghindari terjadinya defisit anggaran. Untuk mengetahui tingkat manipulasi akrual maka dapat dilakukan perhitungan menggunakan rumus modifikasi Jones. Berikut formula proses penurunan persamaannya (Jones & Pendlebury, 2010):

- $TA_{it} = COFO - Dy$
- $\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \alpha \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_1 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$
- $NDA_{it} = \alpha \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_1 \left(\frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right)$

Diskresi akrual (DA) ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$$

Keterangan: Dy_{it} = Surplus/defisit untuk pemerintah daerah *i* pada tahun *t* diperoleh LRA; $COFO_{it}$ = Arus kas bersih dari aktivitas operasi pemerintah daerah *i* pada tahun *t*; ΔREV_{it} = Perubahan pendapatan dari pemerintah daerah *i* pada tahun *t*; ΔREC_{it} = Piutang usaha pemerintah daerah *i* pada tahun *t*; PPE_{it} = Total aset tetap pemerintah daerah *i* pada tahun *t*; A_{it-1} = Total aset pemerintah daerah *i* pada tahun *t-1*; NDA_{it} = Estimasi non diskresi akrual.

Government Size dan Manipulasi Akrual

Salah faktor yang mendorong terjadinya manipulasi akrual adalah *government size*, karena semakin kompleksnya operasionalnya maka akan lebih banyak transaksi, estimasi dan

kebijakan akuntansi yang terlibat. (Abdullah & Kamal, 2023). *Government size* merujuk pada ukuran atau skala pemerintah mencakup kompleksitas, pelayanan publik, dan beragam fungsi pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah. Membuka peluang untuk memanipulasi pengukuran dan estimasi dalam laporan keuangan yang berpengaruh terhadap praktik dan integritas laporan keuangan pemerintah daerah (Handayani et al., 2022).

Penelitian Handayani et al., (2022) menemukan bahwa *Government size* tidak berpengaruh terhadap manipulasi akrual. Sedangkan hasil temuan hasil dari (Abdullah & Kamal, 2023) menemukan bahwa *government size* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual. Hal ini juga sejalan dengan hasil temuan Pilcher (2011) bahwa *government size* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual, dari hasil dari penelitiannya membagi pemerintah daerah menjadi 2 bagian yaitu pemerintah daerah pedesaan dan pemerintah daerah yang terletak di wilayah metropolitan. Pemerintah daerah yang berada di wilayah metropolitan cenderung memiliki akses langsung yang lebih besar ke pemerintah pusat sehingga cenderung menimbulkan resiko dan pengawasan politik yang lebih tinggi jika dana tidak dipergunakan dengan efektif. Sedangkan pemerintah daerah yang terletak di pedesaan yang jauh dari wilayah metropolitan tidak terlalu diperhatikan sehingga pemerintah daerah terpencil tersebut memiliki leluasa untuk melakukan manipulasi akrual. Artinya semakin besar ukuran pemerintah maka tingkat pengawasan dan pengendalian terhadap manipulasi akrual semakin tinggi yang berpotensi menurunkan praktik manipulasi akrual. Dengan demikian hubungan ukuran pemerintahan dan manipulasi akrual dapat dinyatakan dalam hipotesis berikut:

H₁: *Government size* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual.

***Fiscal Distress* dan Manipulasi Akrual**

Fiscal distress mencerminkan masalah dalam memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah daerah baik dalam mengurangi atau meningkat surplus/defisit anggaran. (Abdullah & Kamal, 2023). Sedangkan Trussel & Patrick, (2013) mendefinisikan *fiscal distress* sebagai wujud ketidak-seimbangan signifikan berkelanjutan, ketika pendapatan yang diterima lebih kecil dari pengeluaran tiga tahun berturut-turut yang tercermin dalam arus kas operasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Darwis, & Abdullah, (2022); Abdullah & Kamal, (2023) menyatakan *fiscal distress* tidak berpengaruh terhadap manipulasi akrual pada Provinsi Aceh selama periode 2016-2020, artinya semakin rendah manipulasi akrual yang terjadi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan hasil temuan Shafira & Abdullah, (2022) bahwa *fiscal distress* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya upaya peningkatan pendapatan dan kebutuhan fiskal mendorong terjadinya manipulasi akrual untuk mencerminkan kinerja laporan keuangan yang baik dipengaruhi oleh *fiscal distress*. Dengan demikian hubungan *fiscal distress* dan manipulasi akrual dapat dinyatakan dalam hipotesis berikut:

H₂: *Fiscal distress* berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual.

Sisa Lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Manipulasi Akrual

Adanya sisa lebih dari perolehan penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang sudah terealisasi adalah definisi dari SiLPA. Hasil analisis yang dilakukan (Shafira, 2015; Octariyani et al., 2022; Gamayuni et al., 2022), bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual yang mengindikasikan jika anggaran belanja lebih

besar dari penerimaan daerah, sehingga pemerintah daerah menggunakan kebijakan diskresi akrual untuk menyamarkan laporan keuangan.

Penelitian ini berbeda dengan analisis yang dilakukan Prasetyo & Rusdi (2021) bahwa SiLPA berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual karena peningkatan pendapatan yang terbentuk dari sisa anggaran belanja pemerintah daerah yang tidak terealisasi disebut kinerja keuangan yang buruk. Dimana terdapat sisa anggaran belanja pemerintah tidak terealisasi yang seharusnya nol artinya dalam pengelolaan anggaran dapat menutupi defisit yang terjadi pada periode tersebut. Sejalan dengan temuan Handayani et al. (2022) yang menunjukkan bahwa ketika SiLPA relatif naik yang bersumber dari pendapatan terbentuk dari sisa belanja yang belum terealisasi, maka manipulasi akrual diprediksi akan rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah berupaya menurunkan SiLPA mendekati nol untuk mencerminkan kinerja laporan keuangan yang baik dengan kebijakan diskresi akrual yang abnormal atau manipulasi akrual, begitu juga dengan sebaliknya (Rohman, 2018). Dengan demikian hubungan SiLPA dan manipulasi akrual dapat dinyatakan dalam hipotesis berikut:

H₃: SiLPA berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual.

3. METODE PENELITIAN

Sampel dan Populasi Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berupa data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Menggunakan seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Operasional, Arus Kas, dan Neraca pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 13 Kabupaten dan 4 kota periode 2017-2021 yang sudah di audit oleh BPK RI. Adapun jumlah amatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 5 tahun, sehingga sampel yang diteliti sebanyak 85 amatan Laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pengukuran Variabel

Manipulasi akrual

Manipulasi akrual merupakan tindakan penyesuaian atau perubahan dalam laporan keuangan dengan tujuan memengaruhi evaluasi kinerja keuangan, kualitas pelaporan keuangan, dan pengelolaan surplus atau defisit, untuk pengukuran manipulasi akrual (Donatella, 2021).

Government Size

Government size atau ukuran pemerintah adalah ukuran atau skala pemerintah mencakup kompleksitas, pelayanan publik, dan beragam fungsi pemerintah yang dijalankan oleh pemerintah. Membuka peluang untuk memanipulasi pengukuran dan estimasi dalam laporan keuangan yang berpengaruh terhadap praktik dan integritas laporan keuangan pemerintah daerah (Abdullah & Kamal, 2023).

Fiscal Distress

Fiscal distress merupakan kesulitan keuangan yang terjadi ketika pendapatan lebih kecil dari pengeluaran menyebabkan terjadi defisit, sehingga untuk menghindari masalah tersebut maka dilakukan kebijakan diskresi akrual untuk memanipulasi laporan keuangan

pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah daerah baik dalam mengurangi atau meningkat surplus/defisit anggaran (Trussel, & Patrick, (2013).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran merupakan sisa lebih dari perolehan penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang sudah terealisasi. Pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Kode	Indikator/Pengukuran	Sumber
Manipulasi AkruaI	Y_MA	$DA_{it} = TA_{it} - NDA_{it}$	Metode Model Jones modifikasi (Jones & Pendlebury, 2010)
<i>Government Size</i>	X1_GS	$GS = Ln\Delta Aset$	(Pilcher, 2011; Handayani et, al 2022; Abdulah & kamal 2023)
<i>Fiscal Distress</i>	X2_FD	$FD = \frac{Kas\ Operasi\ Bersih}{Total\ Pendapatan}$	Hasil modifikasi dari model (John M. Trussel, & Patricia A. Patrick, 2013), sejalan dengan penelitian dari (Silvi et al., 2018; Yunartha & Putra, 2019)
SiLPA	X3_SA	$SiLPA = \frac{Realisasi\ SiLPA}{Total\ Pendapatan}$	(Baldrice, 2015; Wulandari & Fauzihardani, 2022)

Teknik Analisa Data

Penelitian ini melakukan teknik analisis data menggunakan regresi berganda. Namun sebelum melakukan hal tersebut maka perlu melakukan pemilihan model terlebih dahulu pada program Eviews dengan melakukan 3 pengujian terlebih dahulu yaitu uji F test (Chow), Uji Hausman, dan Uji *Lagrange Multiplier (LM) Test*. Agar dapat memilih model estimasi regresi yang terbaik antara *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, *Random Effect Model* atau sering disebut teknik *Generalized Least Square (GLS)* (Basuki dan Puwerto, 2016). Adapun persamaan analisis regresi linier berganda pada Studi ini menggunakan persamaan yaitu OLS (*Ordinary Least Square*) sebagai berikut:

$$MA = \alpha + b_1GS + b_2FD + b_3SA + \epsilon$$

Keterangan: MA= Manipulasi AkruaI; GS= *Government Size*; FD= *Fiscal Distress*; SA = SiLPA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model

Menurut Basuki & Prawoto (2016:294) dalam mengelola data panel, maka dilakukan pemilihan model dengan melakukan 3 pendekatan pengujian yang digunakan yaitu; *Common Effect model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect model* sebelum melakukan analisis regresi berganda. Berikut hasil interpretasi tiga pengujian model yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil ketiga pengujian model tersebut model estimasi terbaik yang terpilih sebanyak 2 kali dari pengujian estimasi model yaitu *Random Effect Model (REM)*. Saat dilakukan Uji Chow nilai Prob <0.0000 maka terpilih model *Fixed*, kemudian pengujian kedua yaitu uji Hausman nilai Prob >0.0000 yaitu 0.75 maka terpilih model *Random effect model*, dan pengujian ketiga yaitu LM Test nilai prob. <0.0000 sehingga terpilih model

Tabel 2 Pemilihan Model

Variabel	N	Model Significance Test	Value		Model Result
Y_MA	85	Uji Chow	Prob. F	0.0000	Fixed
X1_GS		Uji Hausmant	Prob Chi-square	0.7592	Random
X2_FD		Uji LM Test	Prob Chi-square	0.0000	Random
X3_SA					

Random effect model. Maka dapat ditarik kesimpulan untuk melakukan analisis berganda pada penelitian ini menggunakan model *Random Effect model* karena terpilih sebanyak dua kali dalam estimasi model.

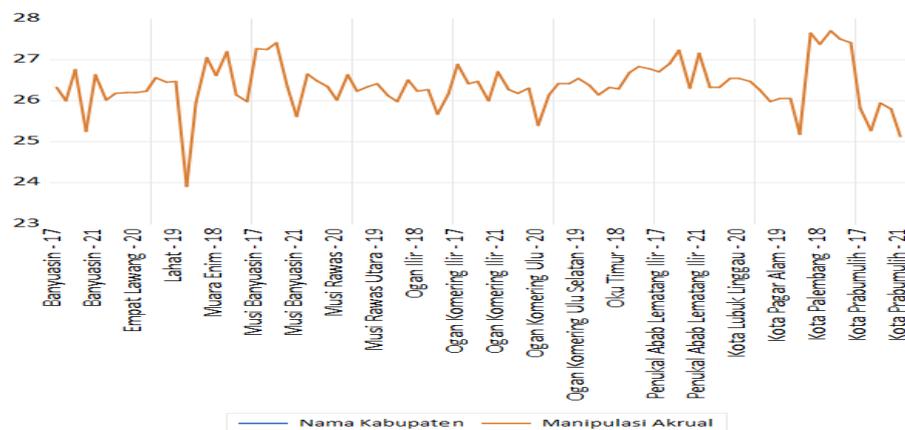
Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dari nilai rata-rata, maksimum, dan minimum disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Rata-Rata	Min	Maks
Y_MA	85	26.36879	23.92100	27.70700
X1_GS	85	28.91785	28.1400	33.80800
X2_FD	85	0.258000	0.072000	0.522000
X3_SA	85	0.0461317	0.000700	0.273230

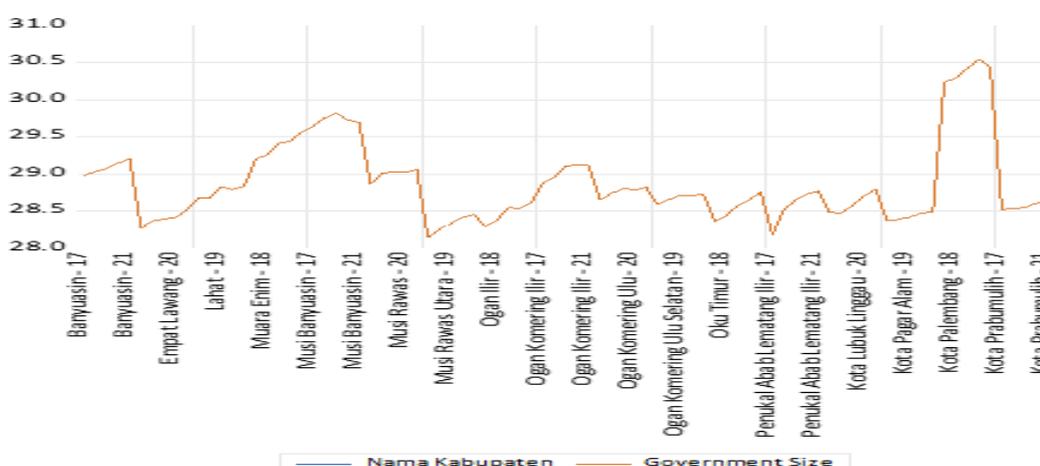
Manipulasi akrual diukur dengan nilai diskresi akrual, jika nilai diskresi akrual tidak sama dengan nol menunjukkan terdapat praktik manipulasi akrual begitu juga dengan sebaliknya. Sesuai hasil yang diperoleh bahwa nilai manipulasi akrual pada Laporan Keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan nilai diskresi akrual nya bernilai tidak sama dengan 0, artinya terdapat praktik manipulasi akrual pada semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2021 dengan nilai rata-rata pada Tabel 3 diperoleh tidak sama dengan nol yaitu sebesar 26.36. Sementara itu, Gambar 1 menunjukkan manipulasi akrual tertinggi terdapat pada Kota Palembang sebesar 27.70 dan terendah pada Kabupaten Lahat sebesar 23.92.



Gambar 1. Manipulasi Akrual Kabupaten/Kota 2017-2021

Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya kelemahan dari penggunaan basis akrual pada sistem pencatatan akuntansi. Meskipun memiliki dampak positif, tetapi adanya kebijakan diskresi akrual yang hadir karena adopsi dari penerapan basis akrual serta tuntutan dari pemangku kepentingan dalam mengelola keuangan menimbulkan terjadi manipulasi akrual karena metodenya sulit dideteksi dari penggunaan diskresi akrual yang abnormal.

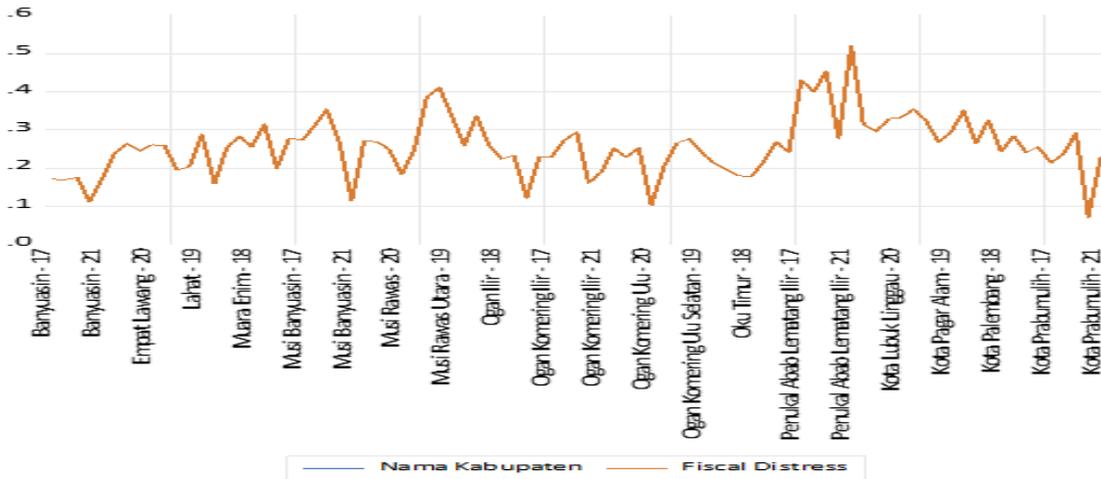
Government size merupakan informasi yang menunjukkan seberapa besar atau kecil ukuran pemerintah yang memiliki pengaruh penting terhadap kinerja keuangan. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak terhadap terjadi manipulasi akrual yang diperoleh dari Ln total. Berdasarkan Tabel 3 secara keseluruhan tingkat *government size* pada penelitian ini diperoleh rata-rata sebesar 28.91 mengindikasikan bahwa ukuran pemerintahnya kecil. Pada Gambar 2 menunjukkan trend tingkat *government size* yang terdapat di laporan keuangan pemerintah daerah. Tingkat maksimum atau nilai tertinggi diperoleh Palembang



Gambar 2. Government Size Kabupaten/Kota 2017-2021

dengan nilai sebesar 30.54, sedangkan untuk nilai terendah terdapat pada kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 28.14. Nilai trend tersebut mengindikasikan jika semakin besar *government size* daerah maka tingkat kinerja keuangan semakin baik, karena pemerintah yang lebih dekat dengan di wilayah pusat cenderung memiliki akses langsung yang lebih besar ke pemerintah pusat yang menimbulkan resiko pengawasan yang lebih tinggi jika dana tidak efektif. Hal tersebut terjadi karena adanya tekanan dari pemangku kepentingan untuk mendapatkan kinerja keuangan yang baik membuat pemerintah daerah berupaya melakukan tindakan manipulasi akrual yang melaporkan laporan keuangan pemerintah yang tidak mengkondisikan posisi pencatatan laporan keuangan yang sebenarnya.

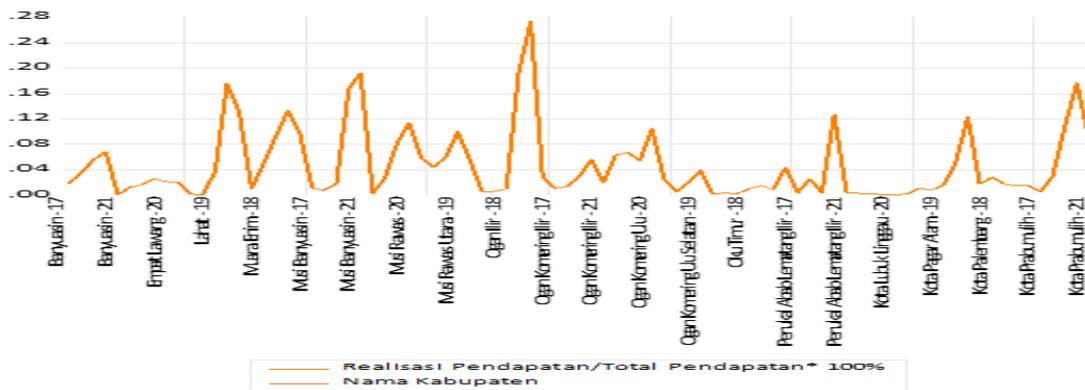
Fiscal distress terjadi ketika pemerintah tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang selama tiga tahun berturut-turut sebesar 5%, dimana terdapat ketidakseimbangan antara pendapatan pemerintah daerah lebih rendah dari pada pengeluaran dan selisihnya atau melebihi 5 % dari total pendapatan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan mengalami kondisi kekurangan dana. Tabel 3 menunjukkan secara rata-rata dari periode 2017-2021 pemerintah daerah mengalami kondisi kesulitan keuangan sebesar 0.258. Dari Gambar 3 terlihat bahwa nilai tertinggi diperoleh oleh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2021 sebesar 0.52 dan



Gambar 3. Fiscal Distress Kabupaten/Kota 2017-2021

nilai terendah diperoleh kota Prabumulih sebesar 0.072 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kekurangan dana dibandingkan pemerintah daerah yang berada di wilayah kota. Pemerintah daerah yang terpencil kurang diperhatikan karena jauh dari pusat kota sehingga memberikan kekuasaan dalam mengelola keuangan untuk mencapai kinerja keuangan yang efektif dan efisien sesuai harapan dari pemerintah pusat dan adanya motivasi untuk mendapatkan dana insentif daerah yang memiliki kinerja keuangan yang baik.

Sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA merupakan selisih dari penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran yang diukur dengan nilai realisasi SiLPA dibagi dengan total pendapatan dikalikan dengan 100%. Pemerintah mengharapkan SiLPA yang mendekati nol yang artinya pemerintah daerah telah mengimplementasikan anggaran sesuai belanja daerah guna memberikan pelayanan publik. Dari Tabel 3 diperoleh rata-rata sebesar 0.046 artinya pemerintah daerah mengupayakan menurunkan SiLPA mendekati nol. SiLPA yang tertinggi diperoleh Kabupaten Ogan ilir sebesar 0.27 serta nilai terendah diperoleh Kabupaten Banyuasin sebesar 0.07, sehingga mencerminkan bahwa pemerintah telah melaksanakan kegiatan pelayanan publik dengan baik melalui tidak tersisanya sisa anggaran belanja yang mendekati nol. Sementara itu, berdasarkan hasil yang diperoleh dari gambar 4 menunjukkan trend bahwa pemerintah daerah mengalami praktik manipulasi akrual dengan



Gambar 4. SiLPA Kabupaten/Kota 2017-2021

melakukan tindakan surplus/defisit mendekati nol. Saat pendapatan lebih rendah yang berasal dari penerimaan dikurangi dengan beban maka dilakukan upaya peningkatan pendapatan untuk mencapai Surplus.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian data menggunakan pendekatan model *Random Effect Model* (REM) menghasilkan persamaan regresi linear berganda yang dapat dilihat pada Tabel 4 yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Regresi dengan *Random Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.47097	0.276763	14.77889	0.0000
GS	0.078308	1.053296	1.469301	0.1456
FD	3.079089	0.843902	3.817123	0.0003
SA	-3.477675	0.865790	-4.016767	0.0001
Adjusted R-squared	0.414195 = 41%			
F-statistic	20.797448			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai simultan atau F adalah 20.79 dimana hasil uji $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($20.79 > 2,71$) dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,0000 < 0,05$). Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen (*Government size*, *Fiscal Distress*, dan *SILPA*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manipulasi akrual. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh R^2 adalah sebesar 41% artinya semua variabel independen memiliki 41% berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu manipulasi akrual sedangkan 59% lagi dijelaskan oleh faktor yang lain.

Pengaruh *Government Size* terhadap Manipulasi Akrual

Analisis statistik menggunakan model regresi uji t pada variabel *government size* terhadap variabel manipulasi akrual menunjukkan bahwa variabel *government size* tidak berpengaruh terhadap manipulasi akrual. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari (Pilcher, 2011; Abdullah & Kamal, 2023) bahwa *government size* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual dimana jika *government size* meningkat maka manipulasi akrual akan mengalami penurunan, begitu juga dengan sebaliknya. Namun penelitian ini sesuai dengan (Sari, 2016; Sari & Mustanda 2019; Handayani, Darwis dan Abdulla, 2022) menemukan tidak berpengaruh antara *government size* terhadap manipulasi akrual. Hal ini disebabkan karena *government size* tidak secara langsung berhubungan dengan pengelolaan keuangan pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Haryadi et al., (2020) menemukan bahwa di sektor privat ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manipulasi akrual.

Implikasinya dapat dilihat dari hasil analisis statistik dimana ukuran diprosikan dengan dengan logaritma natural total aset, sehingga ada kemungkinan jika peraturan dalam pengelolaan keuangan walaupun secara tidak langsung, telah dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. *Government size* yang berukuran besar mempunyai tugas dan tanggung jawab bersifat terperinci sehingga semakin meningkatnya pelayanan dan aset yang dikelola akan besar, dan tidak berdampak kepada pengelolaan keuangan dan anggaran daerah.

Pengaruh *Fiscal Distress* terhadap Manipulasi Akrua

Analisis statistik menggunakan model regresi uji t pada variabel *fiscal distress* terhadap variabel manipulasi akrua menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap manipulasi akrua. Mengindikasikan bahwa semakin tinggi *fiscal distress* atau kesulitan keuangan maka tingkat penggunaan kebijakan diskresi akrua akan semakin tinggi yang berdampak terhadap manipulasi akrua. Dimana pemerintah daerah mengupayakan tidak terjadi *fiscal distress* yang menyebabkan kinerja keuangan buruk sehingga pemerintah daerah menyamakan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berbeda dengan (Handayani, Darwis & Abdulla, 2022; Abdullah & Kamal, 2023) menemukan bahwa *fiscal distress* berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrua, artinya semakin tinggi *fiscal distress* maka tingkat manipulasi akrua akan semakin rendah. Menurut Maher et al., (2020) *fiscal distress* terjadi ketika pemerintah daerah tidak lagi mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Mengindikasikan bahwa pemerintah daerah melakukan manipulasi akrua karena dipengaruhi *fiscal distress*, dimana pemerintah memiliki kondisi ketidakcukupan dana dan ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Sementara pemerintah daerah diberikan dana transfer dari pemerintah pusat untuk melakukan pelayanan publik, sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi (Silvi, 2018)).

Hasil penelitian yang dilakukan (Rohman, 2021; Shafira, 2022) mendukung hasil penelitian ini yakni pemerintah melakukan tindakan diskresi akrua jika terjadi surplus atau defisit pada anggaran. Dimana pengaruh positif *fiscal distress* terhadap manipulasi akrua menyebabkan dampak negatif terhadap kredibilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menimbulkan tindakan desperatif pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan dari pemangku kepentingan sehingga menutupi defisit anggaran atau melakukan manipulasi akrua.

Pengaruh SiLPA terhadap Manipulasi Akrua

Analisis statistik menggunakan model regresi uji t pada variabel SiLPA terhadap variabel manipulasi akrua menunjukkan SiLPA berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrua. Mengindikasikan jika SiLPA meningkat maka tingkat manipulasi akrua rendah, sebaliknya jika SiLPA turun maka manipulasi akrua akan meningkat. Penelitian ini sejalan dengan Handayani et al., (2022), dimana pemerintah daerah melakukan diskresi akrua untuk mencapai performa sesuai yang diharapkan berdasarkan konsep keuangan dengan upaya menurunkan SiLPA mendekati nol. Menyebabkan SiLPA berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrua, dikarenakan penurunan SiLPA yang mendekati nol menimbulkan peningkatan manipulasi akrua untuk menghindari kinerja keuangan yang buruk yang mana SiLPA meningkat terbentuk dari sisa anggaran belanja yang belum terealisasi sehingga dilakukan penurunan SiLPA mendekati nol (Rohman dkk., 2021). Namun hasil ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Shafira (2022) menyatakan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap manipulasi akrua, artinya jika SiLPA meningkat maka manipulasi akrua akan meningkat begitu juga dengan sebaliknya.

Implikasi dari SiLPA berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrua yang dilakukan pemerintah daerah diperoleh laporan keuangan kinerja yang baik, namun tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan adanya manipulasi akrua pada laporan keuangan untuk mengurangi SiLPA, menyebabkan laporan keuangan yang dilaporkan tidak akurat atau tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya. Maka dari itu pemerintah daerah harus menjaga

integritas dalam pelaporan keuangan dan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku untuk mencegah terjadinya manipulasi yang merugikan pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini bertujuan menguji apakah *government size*, *fiscal distress*, dan SiLPA mempengaruhi manipulasi akrual Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian sebagai berikut: 1) *Government size* tidak berpengaruh signifikan terhadap manipulasi akrual. Sejalan dengan penelitian (Sari, 2016; Sari & Mustanda 2019; Handayani, Darwis dan Abdulla, 2022) menemukan tidak ada pengaruh antara *government size* terhadap manipulasi akrual. Artinya besar atau kecilnya ukuran pemerintahan, tidak mempengaruhi terjadinya manipulasi akrual. 2) *fiscal distress* berpengaruh secara positif signifikan terhadap manipulasi akrual. Mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1% pada variabel *fiscal distress* maka pemerintah mengalami kesulitan keuangan atau defisit menimbulkan peningkatan manipulasi akrual. 3) SiLPA berpengaruh secara negatif signifikan terhadap manipulasi akrual yang menimbulkan perbandingan terbalik artinya jika SiLPA tinggi maka manipulasi akrual akan rendah. Karena manipulasi akrual terjadi jika ada upaya untuk menurunkan SiLPA mendekati nol akibat pemerintah mengalami peningkatan pendapatan yang bersumber dari sisa anggaran belanja yang belum terealisasi. Temuan ini diperoleh implikasi koefisien determinasi atau seberapa besar persentase variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 41 % yaitu *government size*, *fiscal distress*, dan SiLPA terhadap manipulasi akrual.

Adapun saran untuk peneliti berikutnya adalah menambah variabel lain seperti internal audit, dana insentif daerah dengan menggunakan perbandingan beberapa model yang digunakan untuk mengukur manipulasi akrual, sehingga memperoleh hasil yang lebih akurat. Hal ini bertujuan untuk melihat tingkat manipulasi akrual dengan diskresi akrual yang seharusnya diharapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Kamal, M. (2023). *Accrual Management in the Local Government of Aceh: An Empirical Evidence*. 6(1), 63–72.
- Anessi-Pessina, E., & Sicilia, M. (2020). Do top managers' individual characteristics affect accounting manipulation in the public sector? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(3), 465–484.
- Arcas, M. J., & Martí, C. (2016). Financial Performance Adjustment in English Local Governments. *Australian Accounting Review* 26(2), 141–152.
- Beck, W. A. (2018). Opportunistic financial reporting around municipal bond issues. *Review of Accounting Studies*, 23(3), 785–826.
- Bisogno, M., & Donatella, P. (2021). Earnings management in public-sector organizations: a structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(6), 1–25. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-03-2021-0035>
- Cohen, S., Bisogno, M., & Malkogianni, I. (2019). Earnings management in local governments: the role of political factors. *Journal of Applied Accounting Research* 20(3), 331–348.

- Donatella, Haraldsson, T. (2021). *donatela_2021.pdf* (p. 19).
- Galiński, P. (2023). Importance of the Size of Local Government in Avoiding the Fiscal Distress – Empirical Evidence on Communes in Poland. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia* 56(5) 101–113.
- Gamayuni, R., Nurdiono, N., & Prasetyo, T. (2022). *A Review of Abnormal Accrual at Government: A Bibliometric Study*. 1–6. <https://doi.org/10.4108/eai.7-10-2021.2316229>
- Gamayuni, R. R. (2022). *Motivation and Abnormal Accrual Characteristics on Financial Statements of Local Governments*. 19(2), 969–991.
- Handayani, Darwanis, & Abdullah, S. (2022). Determinan Manipulasi Akruar Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 12(2), 275–291.
- Haryadi, E., Sumiati, T., & Umdiana, N. (2020). Financial Distress, Leverage, Persistensi Laba Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4(2), 66.
- John M. Trussel, & Patricia A. Patrick. (2013). *Predicting Fiscal Distress In Special District Governments*. 2017(1), 590–620.
- Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). *Public Sector Accounting*.
- Kromen, M. L. B., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. (2023). Pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (suatu kajian studi literatur manajemen keuangan daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 4(4), 460–468.
- Maher, C. S., Oh, J. W., & Liao, W. J. (2020). Assessing fiscal distress in small county governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* 32(4), 691–711.
- Octariyani, E., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Implementation of Discretionary Accrual in Local Governments and Motivation of Local Government Incentives: Literature Review. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(22), 272–279.
- Pellicer, M. J. A., Hodges, R., & Marti, C. (2016). Earnings Management in English Local Governments: Determining factors and instruments. *Financial Accountability & Management* 17463, 1–21.
- Pilcher, R. (2011). Local governmental management of discretionary and specific accruals. *International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, 7(1–2), 32–60.
- Pina, V., Arcas, M. J., & Martí, C. (2012). Accruals and “accounting numbers management” in UK executive agencies. *Public Money and Management*, 32(4), 273–280.
- Prasetyo, D. A., & Rusdi, D. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimue/article/view/17867>
- Ramahdani, A. F., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Ukuran Pemerintah Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)* 6(1), 301–310.

- Rohman, A. (2018). Analysis Effect of Accrual Discretion Against SILPA (SIKPA) Budget Calculations on Local Government. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business* 2(4), 293.
- Rohman, A., Daud, R., & Hakiki, A. (2021). Pengaruh Financial Distress, Idle Cash Dan Opini Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Silpa Pemerintah Daerah. *Akuntabilitas* 15(2), 263–292.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759.
- Septariania, J & Deswati, S. (2023). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Besaran Sisa Lebih Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)* 6(Mi), 5–24.
- Shafira, C. A. (2022). Financial Distress. *Wiley Encyclopedia of Management*, 7(3), 1–3.
- Silvi, A. D. (2018). *Pengaruh Konsentrasi Pendapatan Dan Penggunaan Utang Terhadap Fiscal Distress Pada Pemerintah Kabupaten Di Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu*. 1–9.
- Winarna, J., Widagdo, A. K., & Setiawan, D. (2017). Financial distress of local government: A study on local government characteristics, infrastructure, and financial condition. *Global Business and Finance Review*, 22(2), 34–47.
- Wulandari, S., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Fiscal Stress dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Anggaran dengan Rebudgeting sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 4(1), 93–110.
- Yunartha, P., & Putra, P. (2019). *A Predictive Model of Fiscal Distress Phenomena on Local Government in Indonesia Model Prediktif Fenomena Fiskal Distres Pada Pemerintah Daerah di Indonesia*.